

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN HUBUNGAN DENGAN KEMISKINAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Sesraria Yuvanda<sup>1)</sup>, Muhammad Rachmad R<sup>2)</sup>, Tika Yuniarti<sup>3)</sup>,  
Moh Sahroni Nurkodri<sup>4)</sup>

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi<sup>1)</sup>

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi<sup>2,4)</sup>

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Islam Mamba'ul Ulum<sup>3)</sup>

e-mail koresponden : sesraria@gmail.com<sup>1)</sup>, rachmad@unja.ac.id<sup>2)</sup>, tikayuniarti88@gmail.com<sup>3)</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dan menganalisis pola hubungan kinerja keuangan daerah tersebut dengan kemiskinan daerah. Model analisis yang digunakan adalah Indeks Kinerja Keuangan Daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota dan korelasi pearson product moment untuk menilai hubungan kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa indeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, rerata sebesar 34,63 kategori sedang tetapi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer sangat besar yaitu 83,22% karena kemandirian keuangan daerah amat kecil sebesar 11,61% dan derajat desentralisasi fiskal juga kecil hanya sebesar 9,07%. Sedangkan hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan adalah positif dan signifikan tetapi seharusnya negatif dimana peningkatan kinerja keuangan daerah dapat menurunkan kemiskinan daerah.*

**Kata kunci :** Keuangan; daerah; kemiskinan; otonomi

### **Abstract**

*This study aims to analyze the regional financial performance of regencies/municipalities in Jambi Province during 2020–2024 and to examine the relationship pattern between regional financial performance and regional poverty. The analytical model used is the Regional Financial Performance Index to assess the financial performance of regencies/municipalities and the Pearson product-moment correlation to measure the relationship between regional financial performance and regional poverty. The results show that the average regional financial performance index of regencies/municipalities in Jambi Province is 34.63, which falls into the medium category, but fiscal dependence on transfer funds is very high at 83.22%, since regional financial independence is very low at 11.61%, and the degree of fiscal decentralization is also low at only 9.07%. Meanwhile, the relationship between regional financial performance and poverty is positive and significant, whereas it should ideally be negative, where an improvement in regional financial performance is expected to reduce regional poverty*

**Keywords :** Finance; Region; Poverty; Autonomy

### **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi ekonomi dan birokrasi telah lama berlangsung. Tujuan otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk mempercepat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus kreatif memanfaatkan sumber daya daerah agar pemerintah daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga

peran daerah dalam operasional pemerintah dan pembangunan daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah juga ikut meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah terlihat dari pengurangan jumlah penduduk miskin yang dimiliki Kabupaten/Kota.

Provinsi Jambi yang terdiri atas 11 Kabupaten/Kota telah melaksanakan otonomi daerah dengan mengelola keuangan masing-masing secara mandiri, namun tingkat kemandirian fiskalnya masih relatif rendah. Pada periode 2020–2024, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota tercatat sebesar 9,07% dengan pola perkembangan yang berfluktuasi. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan kondisi serupa, dengan rata-rata sebesar 11,61% yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Sebaliknya, tingkat ketergantungan fiskal berada pada rata-rata 83,22% dan menunjukkan tren yang meningkat. Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, khususnya melalui mekanisme transfer dana dari APBN.

Peneliti terdahulu telah melakukan analisis kinerja keuangan daerah seperti (Harahap, 2020) dimana menganalisis kinerja keuangan daerah dinilai dengan menggunakan instrumen derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Selanjutnya (Siregar & Mariana S, 2020) menganalisis kinerja keuangan pemerintah menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan. Disamping itu (Anugeraheni & Yuniarta, 2022) menilai kinerja keuangan dengan menggunakan 5 rasio yaitu kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan.

Mengamati lebih rinci maka perlu dianalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota melalui Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD). Analisis IKKD dapat memperlihatkan analisis gabungan antara derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah dan indeks ketergantungan fiskal daerah. IKKD tersebut merupakan analisis komprehensif karena gabungan dari 3 indeks yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dan Indeks Ketergantungan Fiskal (IKF). Bila IKKD dihubungkan dengan kemiskinan daerah maka didapat pula bagaimana kaitan IKKD dengan upaya mengurangi penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hal yang urgen dari penelitian ini bukan saja fokus pada analisis kinerja keuangan daerah tetapi menghubungkannya dengan kemiskinan daerah. Tugas yang penting bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengurangi jumlah penduduk miskin dimana rerata Kabupaten/Kota memiliki penduduk miskin sebanyak 25,40 ribu jiwa melalui peningkatan kinerja keuangan daerah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan merupakan wujud otonomi daerah dari aspek keuangan. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota otoritas dalam mengelola keuangan daerah agar mandiri. Namun dalam kenyataannya mayoritas daerah atau Kabupaten/Kota tidak mampu mandiri dalam membiayai operasional pemerintah dan pembangunan daerah. Akibatnya, pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk melaksanakan program kerja daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan desentralisasi fiskal dalam kemandirian keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah dan meningkatkan pelayanan publik (Nadeak et al., 2022). Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan instrumen untuk menilai besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Untuk meningkatkan DDF, pemerintah

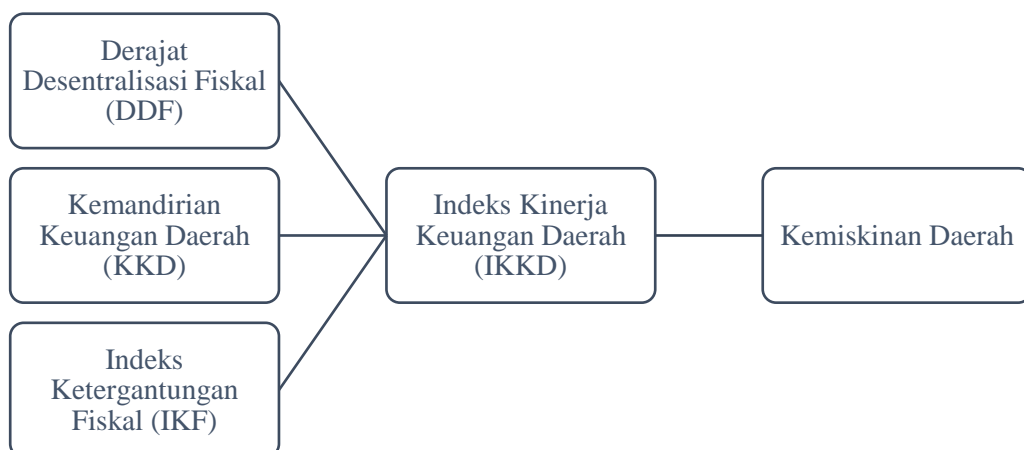
Kabupaten/Kota wajib meningkatkan PAD melalui pemanfaatan sumber PAD. Sumber PAD dapat berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, laba BUMD dan pemanfaatan asset daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) merupakan juga instrumen untuk menilai besaran kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap dana transfer dari pusat. Meningkatkan KKD harus melalui peningkatan PAD. PAD menjadi berperan dalam KKD karena besaran PAD menentukan besaran KKD. Menurut (Devita et al., 2022) semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin besar pula kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Dapat diinterpretasikan pula bahwa peningkatan DDF dan KKD amat ditentukan oleh besaran PAD yang didapat. Untuk upaya peningkatan PAD melalui ketiga sumber PAD harus optimal dilakukan.

Indeks Ketergantungan Fiskal (IKF) merupakan instrumen yang sangat tergantung pada dana transfer dari pusat yang didapat pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat tergantung pada pemerintah pusat melalui dana transfer dari APBN. Menurut (Saragih & Nurlinda, 2023) jika rasio ketergantungan fiskal daerah meningkat, hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan kewenangan otonominya dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Bila DDF, KKD dan IKF digabungkan menjadi indeks tertimbang maka didapat Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD). IKKD dapat menilai secara komprehensif atas tiga instrumen tersebut (DDF, KKD dan IKF). Dari IKKD tersebut dapat dinilai kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2020-2024.

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin daerah. Peningkatan kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota harusnya berhubungan negatif dengan kemiskinan daerah. Jumlah penduduk miskin daerah akan berkurang bila kinerja keuangan daerah meningkat. Deskripsi alur pikir kinerja keuangan daerah dan hubungannya dengan kemiskinan daerah dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Kemiskinan Daerah

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan korelasional. Disamping itu juga dilengkapi dengan metode Indept guna mendalami hasil penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024. Model analisis data yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Kinerja Keuangan Daerah.

1. Indeks Kemandirian Keuangan Daerah

$$IKKD = \frac{DDF+KKD+IKF}{3}$$

2. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Kemandirian Keuangan Daerah

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}} \times 100\%$$

4. Indeks Ketergantungan Fiskal

$$IKF = \frac{\text{Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk menganalisis hubungan kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan daerah digunakan pula model analisis korelasi Pearson Product Moment dengan formulasi sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana  $r$  = Koefisien korelasi Pearson Product Moment

$X$  = Indeks Kinerja Keuangan Daerah

$Y$  = Jumlah Penduduk Miskin

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kinerja Keuangan Daerah

Untuk menilai kinerja keuangan daerah digunakan IKKD (Indeks Kinerja Keuangan Daerah) dimana IKKD merupakan formula rerata gabungan atas 3 indikator keuangan daerah. Ketiga indikator keuangan daerah berupa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dan Indeks Ketergantungan Fiskal (IKF). Oleh karena itu, sebelum menghitung IKKD maka perlu ditetapkan besaran DDF, KKD dan IKF setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024. Perhitungan dan bahasan DDF, KKD dan IKF beserta IKKD setiap Kabupaten/Kota tersebut dijabarkan berikut ini.

##### a. DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Rerata selama tahun 2020-2024, DDF terbesar dimiliki Kota Jambi sebesar 25,28 sedangkan terkecil dimiliki Kabupaten Kerinci hanya sebesar 4,73. Untuk rerata gabungan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 9,07 kategori kecil juga karena dibawah 10%. Sepatutnya (Yuvanda et al., 2023) guna pelaksanaan operasional otonomi daerah pendapatan asli daerah perlu berkontribusi minimal 25% terhadap pendapatan daerah. Kenyataannya hanya Kota Jambi yang memiliki DDF diatas 25% kategori sedang karena PAD rerata mencukupi tetapi Kabupaten Kerinci DDF kecil karena PAD rerata juga tidak mencukupi membiayai operasional dan pembangunan

daerah. Deskripsi lebih rinci tentang DDF Kabupaten/Kota dimuat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun					Rerata Gabungan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Kerinci	6,79	5,64	3,18	4,57	3,49	4,73
Kabupaten Merangin	7,32	7,84	7,94	6,80	7,63	7,51
Kabupaten Sarolangun	6,07	5,56	5,22	4,71	5,13	5,34
Kabupaten Batanghari	8,71	11,04	8,46	9,71	9,05	9,39
Kabupaten Muaro Jambi	7,01	7,98	8,02	7,80	8,15	7,79
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4,72	7,02	4,67	5,26	4,86	5,31
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	8,13	7,69	7,84	8,63	6,90	7,84
Kabupaten Tebo	7,23	7,96	6,73	6,79	7,51	7,24
Kabupaten Bungo	9,90	15,22	10,27	12,17	12,06	11,92
Kota Jambi	21,93	23,28	26,18	26,97	28,06	25,28
Kota Sungai Penuh	3,88	7,60	8,53	9,14	8,00	7,43
Rerata Gabungan						9,07

Sumber: Data Olahan, 2025

**b. KKD (Kemandirian Keuangan Daerah)**

Rerata gabungan nilai kemandirian keuangan daerah (KKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi hanya sebesar 11,61 untuk tahun 2020-2024. Selama tahun tersebut hanya Kota Jambi yang punya KKD terbesar yaitu sebesar 38,96 dan KKD terkecil dipunyai Kabupaten Kerinci yaitu hanya sebesar 5,41%, Kabupaten Kerinci memiliki kemandirian keuangan daerah kategori kecil untuk membiayai dana operasional pemerintah dan pembangunan daerah. Sebaliknya Kota Jambi kemandirian keuangan daerahnya besar dalam pembiayaan tersebut. Namun secara rerata gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan kemandirian keuangan daerah tidak begitu besar hanya sebesar 11,61. Deskripsi lebih detail tentang nilai KKD setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dimuat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun					Rerata Gabungan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Kerinci	7,96	6,57	3,59	5,22	3,72	5,41
Kabupaten Merangin	8,77	9,48	9,42	8,03	8,64	8,87
Kabupaten Sarolangun	7,19	6,60	5,98	5,38	5,64	6,16
Kabupaten Batanghari	10,56	13,65	10,27	11,57	10,64	11,34
Kabupaten Muaro Jambi	8,38	9,62	9,38	9,28	9,49	9,23
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5,42	8,21	5,24	5,96	5,41	6,05
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	9,67	8,62	8,96	10,11	7,73	9,02
Kabupaten Tebo	8,80	9,77	7,92	8,09	8,60	8,64
Kabupaten Bungo	12,50	20,34	12,64	15,73	14,91	15,22
Kota Jambi	33,11	35,94	40,31	42,71	42,72	38,96
Kota Sungai Penuh	4,36	9,21	10,15	11,05	9,48	8,85
Rerata Gabungan						11,61

Sumber: Data Olahan, 2025

**c. IKF (Indeks Ketergantungan Fiskal)**

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, secara rerata IKF masih besar yaitu sebesar 83,22. Berarti 83,22% pendapatan daerah sangat tergantung dari dana transfer APBN atau pemerintah pusat. Hanya Kota Jambi IKF terkecil yaitu sebesar 64,95 tetapi Kabupaten Kerinci IKF sebesar 88,19. IKF Kabupaten Kerinci sangat besar mendekati 90% dimana ketergantungan pemerintah kabupaten Kerinci terhadap dana transfer atau dana perimbangan dari pusat amat besar. Hal ini sama dengan hasil penelitian (Abdullah & Hasan, 2022) dimana kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat.

Deskripsi perhitungan IKF setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dimuat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Indeks Ketergantungan Fiskal (IKF) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun					Rerata Gabungan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Kerinci	85,22	85,86	88,67	87,40	93,79	88,19
Kabupaten Merangin	83,44	82,73	84,24	84,63	88,35	84,68
Kabupaten Sarolangun	84,34	84,30	87,36	87,50	91,00	86,90
Kabupaten Batanghari	82,43	80,89	82,41	83,86	85,08	84,14
Kabupaten Muaro Jambi	83,69	82,93	85,46	84,06	85,81	84,39
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	86,98	85,47	89,16	88,32	89,76	87,94
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	84,03	89,26	87,47	85,33	89,25	87,07
Kabupaten Tebo	82,15	81,44	85,06	83,92	87,00	83,91
Kabupaten Bungo	79,23	74,85	81,27	77,35	80,88	78,72
Kota Jambi	66,23	64,76	64,96	63,15	65,67	64,95
Kota Sungai Penuh	89,01	82,47	84,05	82,73	84,40	84,53
Rerata Gabungan						83,22

Sumber: Data Olahan, 2025

**d. IKKD (Indeks Kinerja Keuangan Daerah)**

IKKD merupakan angka rerata tertimbang atas DDF, KKD dan IKF. IKKD dihitung untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa secara rerata gabungan IKKD Kabupaten/Kota tersebut adalah sebesar 34,63 kategori sedang. IKKD termasuk kategori tinggi dipegang oleh Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Akan tetapi IKKD terbesar dimiliki Kota Jambi yaitu sebesar 43,06, sedangkan IKKD terkecil dipegang Kabupaten Kerinci sebesar 32,78 dan Kabupaten Sarolangun sebesar 32,80. Dapat diinterpretasikan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jambi mayoritas kategori sedang saja dengan rerata tertimbang sebesar 34,63. Deskripsi lebih rinci tentang perhitungan IKKD dapat diamati pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. DDF, KKD, IKF dan IKKD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	DDF	KKD	IKF	IKKD	Kategori
Kabupaten Kerinci	4,73	5,41	88,19	32,78	Sedang
Kabupaten Merangin	7,51	8,87	84,68	33,69	Sedang
Kabupaten Sarolangun	5,34	6,16	86,90	32,80	Sedang
Kabupaten Batanghari	9,39	11,34	84,14	34,96	Sedang
Kabupaten Muaro Jambi	7,79	9,23	84,39	33,80	Sedang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5,31	6,05	87,94	33,10	Sedang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	7,84	9,02	87,07	34,64	Sedang
Kabupaten Tebo	7,24	8,64	83,91	33,26	Sedang
Kabupaten Bungo	11,92	15,22	78,72	35,29	Tinggi
Kota Jambi	25,28	38,96	64,95	43,06	Tinggi
Kota Sungai Penuh	7,43	8,85	84,53	33,60	Sedang
Rerata Gabungan				34,63	Sedang

Sumber: Data Olahan, 2025

**Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Kemiskinan Daerah**

Untuk melihat hubungan kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 maka perlu dideskripsikan jumlah penduduk miskin yang dimiliki setiap kabupaten/kota tersebut. Secara rerata Kota Jambi memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak pertama sebesar 50,48 ribu jiwa serta terbanyak kedua dan ketiga Kabupaten Merangin sebesar 34,44 ribu jiwa dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 34,31 ribu jiwa. Sedangkan Kota Sungai Penuh pemilik jumlah penduduk miskin paling sedikit hanya sebesar 2,74 ribu jiwa. Deskripsi lebih detail tentang jumlah penduduk miskin per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)

Wilayah	Tahun					Rerata Gabungan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Kerinci	17,48	18,45	18,20	18,21	16,83	17,83
Kabupaten Merangin	33,92	35,44	34,14	35,19	33,49	34,44
Kabupaten Sarolangun	25,79	27,06	26,23	26,77	26,64	26,48
Kabupaten Batanghari	26,54	27,24	26,24	25,88	23,73	25,93
Kabupaten Muaro Jambi	17,30	20,49	20,64	20,83	17,48	19,35
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24,23	24,42	23,42	23,33	21,86	23,45
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	34,78	36,10	33,95	33,61	33,12	34,31
Kabupaten Tebo	22,47	23,77	22,81	23,47	22,48	23,00
Kabupaten Bungo	22,07	23,64	20,69	20,65	20,04	21,42
Kota Jambi	50,44	54,23	50,40	50,09	47,25	50,48
Kota Sungai Penuh	2,78	3,03	2,64	2,66	2,60	2,74
Rerata Gabungan						25,40

Sumber: Data Olahan, 2025

Guna menghitung nilai koefisien korelasi *Pearson* maka rerata jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota selama tahun 2020-2024 dapat disepadankan dengan nilai IKKD (Indeks Kinerja Keuangan Daerah) yang termuat pada tabel 4. Paparan data rerata penduduk miskin dan IKKD kabupaten/kota untuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Miskin dan IKKD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Rerata	
	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	IKKD
Kabupaten Kerinci	17,83	32,78
Kabupaten Merangin	34,44	33,69
Kabupaten Sarolangun	26,48	32,80
Kabupaten Batanghari	25,93	34,96
Kabupaten Muaro Jambi	19,35	33,80
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	23,45	33,10
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	34,31	34,64
Kabupaten Tebo	23,00	33,26
Kabupaten Bungo	21,42	35,29
Kota Jambi	50,48	43,06
Kota Sungai Penuh	2,74	33,60

Sumber: Data Olahan, 2025

Dari sajian data tabel 6 diatas maka dapat dihitung nilai koefisien korelasi *Pearson* melalui program SPSS. Hasil perhitungan memperlihatkan nilai koefisien korelasi *Pearson* adalah  $r_s = 0,710$ , dengan signifikansi sebesar  $P = 0,014$ . Berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin dengan indeks kinerja keuangan daerah (IKKD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data hasil perhitungan koefisiensi korelasi *Pearson* dimuat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Korelasi *Pearson* Penduduk Miskin dengan IKKD

		Penduduk Miskin	IKKD
Penduduk Miskin	Pearson Correlation	1	.710*
	Sig. (2-tailed)		.014
	N	11	11
IKKD	Pearson Correlation	.710*	1
	Sig. (2-tailed)	.014	
	N	11	11

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 7 di atas menyajikan bahwa  $r_s = 0,710$  dengan  $P = 0,014$  dimana hubungan penduduk miskin dengan IKKD adalah positif. Hasil perhitungan tersebut menarik karena seharusnya hubungan antara penduduk miskin dengan IKKD adalah negatif dimana peningkatan kinerja keuangan daerah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Berbeda dengan hasil penelitian (Miar et al., 2024) kinerja keuangan daerah tidak signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Dapat pula diartikan bahwa upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah tidak memberi dampak terhadap pengurangan penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi bila kinerja keuangan daerah tidak difokuskan pada upaya mengurangi penduduk miskin oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sejalan dengan hasil penelitian ini (Yuvanda et al., 2025) menyatakan derajat desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari IKKD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja ekonomi dimana kemiskinan merupakan salah satu instrumen kinerja ekonomi tersebut.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Indeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 hanya sebesar 34,63 kategori sedang saja. Rerata ketergantungan fiskal pemerintah kabupaten/kota terhadap dana transfer dari pusat sangat besar yaitu 83,22% karena kemandirian keuangan daerah amat kecil hanya sebesar 11,61% dan derajat desentralisasi fiskal juga kecil sekali hanya sebesar 9,07%.
2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin dengan IKKD pada  $r_s = 0,71$  dan  $P = 0,014$ . Seharusnya hubungan tersebut negatif dimana peningkatan IKKD dapat berhubungan dengan pengurangan penduduk miskin tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

### **Saran**

Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi perlu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD) meningkat. Namun peningkatan IKKD harus mendorong pengurangan penduduk miskin melalui kegiatan pengentasan kemiskinan yang dibiayai PAD Kabupaten/Kota.

### **DAFTAR PUSATAKA**

- Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Devita, A., Handra, H., & Yonnedi, ; Efa. (2022). Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 2085–1960.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Miar, Zakiah, W., Giovanni, J., & Cerisma, S. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Tengah Kalimantan : Perspektif Pendidikan. *Cendekia*, 18(1), 72–88.
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v4i1.339>
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah , Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022 di Indonesia . Sistem pemerintahan pada masa orde baru yang terpusat ( sentralisasi kekuas. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6, 1–11.
- Siregar, A. O. D., & Mariana S, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat). *Jurnal Image*, 9(1), 1–19.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Herlin, F. (2023). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 11(2), 90–96. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.310>
- Yuvanda, S., Rachmad R, M., & Herlin, F. (2025). Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(02), 525–532.